

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN POSO

Oleh : Abd Khalid Hs Pandipa

Pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso mulai dari perencanaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebelum melakukan suatu kegiatan atau program diawali dengan perencanaan, sehingga fungsi perencanaan berjalan dengan efektif, penggerakan Salah satu penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas adalah dengan memberikan penghargaan kepada staf yang sukses melakukan tugasnya, penghargaan tersebut berupa insentif ataupun pujian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap pada staf melakukan pekerjaannya hal ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan yang efektif pada sektor pemerintahan Dinas Pertanian dan Perkebunan. pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan untuk pengorganisasian tugas dalam pelaksanaan rencana kegiatan antara atasan dan bawahan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat belum efektif. Dengan kata lain pengorganisasian untuk dapat terlaksanan rencana kegiatan, perlu dilakukan pengorganisasian berupa tugas atau wewenang dan tanggung jawab. Dari hasil penelitian ditemukan pula faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso adalah Kemampuan Sumber Daya Manusia dan kurangnya Sarana dan Prasarana, seperti Meja, Kursi dan Komputer serta terbatasnya biaya operasional. Berdasarkan hasil Pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : Pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dalam proses perencanaan harus diperhatikan tentang kelambatan penyelesaian urusan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab harus di perhatikan dan diperbaiki untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso mulai dari penggereakan dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik namun Pengorganisasian masih belum diperbaiki.

Dalam rangka pemberian pelayanan pada masyarakat harus diperhatikan Kemampuan dan Keahlian Sumber Daya Manusia dalam hal ini Aparat teknis atau Penyuluh pertanian dalam pemberian Pelayanan kepada masyarakat. Ditambah sarana dan prasarana harus seperti meja, kursi dan komputer diadakan baru dan biaya operasional harus ditambah guna meningkatkan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Fungsi Manajemen

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Indonesia di Bidang Pelayanan yang bertujuan untuk merubah paradigma pelayanan dalam rangka mewujudkan pencapaian derajat pelayanan masyarakat yang setinggi – tingginya. Program ini memberikan persepsi baru bagi masyarakat bahwa pelayanan bukan merupakan barang konsumtif akan tetapi investasi yang semakin diperhatikan untuk mendapatkan manfaat yang semakin besar.

Berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; yang kemudian kedua UU tersebut direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya UU tersebut akan semakin banyak aktivitas yang harus ditangani oleh Daerah, sehingga aparat di Daerah dituntut untuk dapat memahami dan mempraktekkan ilmu Manajemen Pelayanan. Berlakunya UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tsb mengakibatkan interaksi antara aparat Daerah dan masyarakat menjadi lebih intens; hal ini juga ditambah dengan makin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan HAM yang akan melahirkan kuatnya tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang secara merata menyebar di seluruh tanah air. Karena itu, perlu disadari bahwa faktor pelayanan merupakan salah satu faktor penentu terwujudnya pembangunan kualitas manusia seutuhnya sebagai modal dasar pembangunan Nasional tersebut. Hakekat pembangunan dibidang pelayanan adalah ditekankannya kemampuan hidup sehat bagi seluruh warga Negara Indonesia, agar dapat mewujudkan derajat pelayanan yang berkualitas.

Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan, penambahan penduduk dengan berbagai kegiatan dan aktifitasnya, tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi mengharuskan aparat pemerintah disemua tingkat, khususnya di lingkungan jajaran Departemen Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan fungsi dan perannya sebagai Pamong Praja/ Pengayom Masyarakat. Oleh karenanya peningkatan mutu, kemampuan, pemahaman tugas dan kewajibannya serta kesungguhan didalam menundukan citra dan wibawa aparat, termasuk menegakan disiplin dan tata tertib dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang didasari dan kewenangannya perlu dimantapkan dan ditingkatkan.

Peranan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi sangatlah penting, karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penggerak lancarnya proses kerja. Dengan lancarnya proses kerja maka organisasi yakni untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berbagai masalah dihadapi buruknya kinerja publik antara lain dikarenakan belum dilaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik untuk dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat atau publik oleh aparatur pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dan fungsi Negara dan sebagai abdi masyarakat juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Jika dulu masyarakat cenderung menerima apa adanya pelayanan yang mereka terima dari aparatur pemerintah maka situasinya saat ini telah berubah. Dengan semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat sejak era reformasi masyarakat menuntut terselenggaranya pemerintah yang bersih dan untuk meningkatkan fungsi dan keprofesionalisme birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat semakin menyadari mendapatkan pelayanan publik yang baik merupakan hak masyarakat. Sebaliknya bagi aparatur pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat merupakan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah

kecuali harus benar – benar berupaya memperbaiki pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Menyadari akan arti pentingnya optimalisasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat pemerintah telah menunjukkan keinginan untuk melaksanakan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik dimulai dengan dikeluarkannya INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, dimana inti dari Instruksi Presiden ini adalah untuk mengambil langkah yang terkoordinir dari instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. optimalisasi pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau orang lain, organisasi pemerintah / swasta (Sosial, Politik, LSM) Sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Optimalisasi Pelayanan sektor publik adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan asas pelayanan publik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, diperlukan proses penyelenggaraan dari setiap bidang organisasi untuk bersama – sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Olehnya diperlukan adanya tenaga kerja atau pegawai yang potensial dan mampu berkreatifitas kerja dengan baik dan juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang fungsi manajemen, sehingga dapat tercipta suasana pekerjaan yang rapih dan tertib serta mampu mencapai target yang telah ditentukan. Dalam tataran organisasi pemerintah, pelaksanaan fungsi manajemen sangat penting guna menunjang pelayanan pegawai kepada masyarakat. Ditinjau dari sudut perosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan tahap – tahap bahwa manajemen adalah proses kerjasama yang menggerakkan tindakan – tindakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. sedangkan dari sudut fungsional bahwa didalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan terdapat fungsi manajemen yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Pelaksanaan fungsi manajemen antara lain juga dimaksudkan untuk memaksimalkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan harus secara baik dan benar. Pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat

diharapkan dapat lebih meningkat terkait dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi secara menyeluruh.

Efektifnya pelaksanaan fungsi manajemen pada pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso sebagai perangkat daerah yang melayani masyarakat akan dapat maksimal apabila seluruh waktu konsentrasi dan pikiran aparatur benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat. Karena dengan pelayanan publik yang tidak prima terhadap masyarakat maka akan menimbulkan sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah dalam arti bahwa partisipasi masyarakatpun berkurang. walaupun pemerintah telah menetapkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur pelayanan kepada masyarakat yang di tuangkan dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 25 tahun 2009 akan tetapi kenyataan yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang di lakukan menunjukkan bahwa masih ada keluhan yang timbul dari masyarakat menyangkut pelaksanaan fungsi menejemen untuk pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan masih belum maksimal karena adanya berbagai keluhan yang timbul dari masyarakat menyangkut kualitas pelayanan yang di berikan seperti adanya kelambatan penyelesaian urusan, pegawai yang kurang mengerti wewenang dan tanggung jawabnya, kurang adanya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan dalam pengorganisasian tugas. Dari semua permasalahan ini menunjukkan belum optimalnya penerapan fungsi menejemen di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso akibatnya pelayanan pegawai seperti yang di harapkan selama ini dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sulit untuk bisa tercapai. Demikian pula Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam menunjang kegiatan.

Menjalankan tugas pokok terhadap pelayanan masyarakat, dan kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masih sangat kurang jika dilihat dari aspek kemampuan dan keterampilan dalam hal ini sebagai operator komputer masih kurang memahami teknologi informasi sehingga memperlambat dalam proses pelayanan di Dinas Pertanian Dan perkebunan. Teridentifikasi bahwa dengan adanya pemikiran seperti ini yang akan memperburuk citra pemerintah sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Aparatur Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso kepada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik mengangkat Judul : “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso”.

TEORI DAN KONSEP

Syarifudin (2009:1) berpendapat bahwa istilah manajemen berasal dari kata *management* (bahasa Inggris) turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer (Orangnya) mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ilmu seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta rasional untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk mengatur kegiatan – kegiatan atau pelayanan perizinan disebut Manajemen Pelayanan.

Untuk melengkapi dukungan teori manajemen dalam penelitian ini maka berikut ini akan diuraikan beberapa fungsi manajemen terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.R. Terry (2001:65) meliputi: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perencanaan (*Planning*). Perencanaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer guna untuk menetapkan hal yang akan dikerjakan oleh semua orang – orang yang terlibat dalam organisasi, membuat suatu ikhtisar lingkup dan perincian mengenai segala sesuatu yang diperlukan dan bagaimana melaksanakannya. Perencanaan (*planning*) berarti memikirkan secara cermat untuk mempertimbangkan, menentukan dan mengatur faktor – faktor yang dibutuhkan dalam mengerjakan sesuatu kegiatan. Jadi pada prinsipnya perencanaan adalah proses memikirkan, menimbang, memutuskan dan menentukan tentang :

1. Apa yang harus dikerjakan ;
2. Kapan pekerjaan itu dilakukan ;
3. Bagaimana melakukan pekerjaan itu ;

4. Siapa yang ditugaskan melakukan pekerjaan itu ;
5. Dimana pekerjaan itu akan dilakukan, dan selanjutnya ;
6. Mengapa pekerjaan dilakukan.

Pengorganisasian (*Organizing*). Penyusunan organisasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha – usaha membuat struktur organisasi yang menyangkut tentang wewenang formal dan tanggung jawab, melalui bagian – bagian, maka pekerjaan akan dilaksanakan.

Penggerakan (*Actuating*). Penggerak adalah tindakan menggerakkan orang – orang agar mau bekerja dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan secara fisik kegiatan – kegiatan sebagaimana disiapkan oleh *planning* dan *organizing*. Penggerak ini perlu digunakan untuk merealisasikan perencanaan dan kegiatan nyata agar tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan adalah tindakan suatu aktifitas untuk mengukur dan mengoreksi semua tindakan – tindakan pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan mengontrol meliputi semua kegiatan yang telah direncanakan semula. Oleh karena itu, maka langkah yang harus diperlukan dalam menjalankan pengawasan tersebut adalah menentukan standar atau ukuran menguji semua kegiatan semua orang – orang apakah sesuai dengan standar kemudian memperbaiki dan merumuskan tindakan – tindakan yang tidak sesuai.

Pelayanan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam suatu interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain, atau mesin secara fisik, dan kepuasan pada pelanggan. Menurut pendapat Moenir “Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan baik bersifat temporer maupun dalam proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Deskriptif Kualitatif* yang menunjuk pada prosedur – prosedur yang menghasilkan data kualitatif dengan pendekatan ini dapat memahami objek secara personal dan memandang objek sebagaimana objek sendiri mengungkapkan pandangan mereka, menangkap pengalaman - pengalaman

dalam aktifitas sehari – hari dan mengkaji pengalaman yang sama selagi belum diketahui (Bognan dan Taylor,1993). populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang bekerja pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso yang berjumlah 104 orang dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebanyak 17 orang dalam waktu 1 bulan sehingga berjumlah 121 orang. sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih orang-orang tertentu yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner.

HASIL PENELITIAN

Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso berperan menyelenggarakan Pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan yang optimal. Dengan demikian Dinas Pertanian Dan Perkebunan berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan pelayanan terhadap masyarakat serta upaya yang diselenggarakan di Dinas Pertanian Dan Perkebunan terdiri dari upaya pelayanan.

Yang termasuk dalam upaya pelayanan dalam lingkup pemerintahan adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan yang ditemukan masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan aparatur dalam konsep pelayanan publik.

Agar upaya pelayanan terselenggara secara optimal, maka Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso harus melaksanakan manajemen dengan baik. Manajemen Dinas Pertanian Dan Perkebunan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistemik untuk menghasilkan pelayanan secara efektif dan efisien. Manajemen Dinas Pertanian Dan Perkebunan terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian serta Pengawasan yang bertanggung jawab. Seluruh kegiatan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

1. Perencanaan

Perencanaan tingkat Dinas Pertanian Dan Perencanaan Kabupaten Poso disusun untuk mengatasi masalah pelayanan yang ada di wilayah kerja Kabupaten Poso baik upaya pelayanan wajib, dan upaya pengembangannya. Perencanaan disusun untuk kebutuhan satu tahun

agar Dinas Pertanian Dan Perkebunan mampu melaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan disusun melalui 4 tahap yaitu :

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Analisis Situasi
- c. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
- d. Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.

Penyusunan perencanaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan

Tahap ini mempersiapkan staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap – tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan cara :

- a. Kepala Dinas membentuk tim penyusun perencanaan yang anggotanya terdiri dari staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso
- b. Kepala Dinas menjelaskan tentang pedoman perencanaan tingkat Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi keberhasilan penyusunan perencanaan.
- c. Kepala Dinas mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan perencanaan di Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso keterlibatan staf dalam perencanaan, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang
Pelaksanaan Perencanaan

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	24	55.8
Kadang – kadang	16	37.2
Jarang Sekali	3	7
Tidak Pernah	-	-
Jumlah	43	100

Sumber: Olahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel 7 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden, 24 atau 55.8 % yang menjawab selalu, dan 16 atau 37.2 % responden menjawab kadang –kadang dan 3 oarang atau 7 % menjawab jarang sekali, disini bisa dilihat prinsipnya Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebelum melakukan suatu kegiatan atau program diawali dengan perencanaan, sehingga fungsi perencanaan berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf inisial JM menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan suatu program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan selalu diawali dengan proses perencanaan sehingga kegiatan berjalan dengan efektif”. (hasil wawancara, 6 Mei 2013)

Dari Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Pelaksanaan suatu program kegiatan Kepala Dinas selalu mengawali kegiatan tersebut dengan proses perencanaan sehingga dapat berjalan secara efektif

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang
Keterlibatan Staf Dalam Perencanaan

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase (%)
Selalu	22	51.1
Kadang – kadang	18	41.8
Jarang sekali	3	7
Tidak pernah	-	-
Jumlah	43	100

Sumber: Olahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden, 22 atau 51.1 % responden yang menjawab selalu, 18 orang atau 41.8 % responden menjawab kadang – kadang dan 3 orang atau 7 % menjawab jarang sekali, disini bisa dilihat bahwa Kepala Dinas dalam melakukan perencanaan melibatkan Staf.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bagian Manajemen inisial FI yang menyatakan sebagai berikut :

“Pihak Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam perencanaan selalu melibatkan staf di Dinas. Disini bisa dilihat bahwa prinsipnya Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebelum melakukan suatu kegiatan atau program selalu diawali dengan perencanaan dengan melibatkan staf dinas Ujarnya”. (hasil wawancara, 7 Mei 2013)

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas dalam melakukan perencanaan melibatkan seluruh staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa lebih efektif.

2). Tahap Analisis Situasi

Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. Tim yang telah disusun oleh Kepala Dinas melakukan pengumpulan data. Data tersebut diperoleh melalui rapat atau pertemuan – pertemuan yang dilakukan. Pada table berikut memperlihatkan bahwa :

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang
Perencanaan Rapat/Pertemuan

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase (%)
Selalu	30	69.8
Kadang – kadang	11	25.5
Jarang sekali	2	4.7
Tidak pernah	-	-
Jumlah	43	100

Sumber: Olahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden 30 atau 69.8 % responden yang menjawab selalu, 11 orang atau 25,5 %

responden menjawab kadang – kadang, 2 orang atau 4.7 % menjawab jarang sekali. Disini bisa dilihat bahwa Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso untuk mendapat data dapat dilakukan pada rapat atau pertemuan sehingga dalam tahap ini sudah berjalan dengan efektif.

Inisial LP salah seorang staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan yang menyatakan sebagai berikut :

“Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso untuk mengumpulkan data terlebih dahulu Kepala Dinas melakukan rapat dengar stafnya untuk membicarakan bersama”. (hasil wawancara, 7 Mei 2013)

Dari pernyataan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa Kepala Dinas dalam mengumpulkan data dilakukan bersama stafnya untuk dibicarakan bersama dan merupakan hal yang penting, sehingga di butuhkan kejujuran dan penjelasan yang akurat agar tidak di salah artikan. Tanggung jawab oleh semua kalangan staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan agar bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik.

3). Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan, dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana usulan kegiatan bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki yang masih bermasalah.
- b) Menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kerja dan kemampuan.

4). Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan baik upaya pelayanan maupun inpvasi dilaksanakan secara bersama, terpadu dan terintegritasi. Hal ini sesuai dengan asas penyelenggraan pemerintah yang bersih dari KKN yaitu keterpaduan. Langkah – langkah penyusunan Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan adalah :

- a) Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui.

- b) Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan rencana usulan kegiatan yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan.
- c) Menyusun rencana awal, rincian dan volume kegiatan yang dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut bulan dan alokasi pelaksanaan.
- d) Mengadakan lokakarya mini tahunan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahap ini kepala Dinas menentukan dan mendistribusikan semua kegiatan yang telah direncanakan kepada masing – masing seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tabel berikut dapat dilihat tentang pengorganisasian pelaksanaan kegiatan.

Tabel 10
Tanggapan Responden tentang
Pembagian kerja

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	2	4.7
Kadang – kadang	17	39.5
Jarang sekali	19	44.1
Tidak pernah	5	11.6
Jumlah	43	100

Sumber: Olahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden 2 atau 4.7 % responden yang menjawab selalu, 17 orang atau 39.5% responden menjawab kadang – kadang, 19 orang atau 44.1 % responden menjawab jarang sekali dan 5 orang atau 11.6 responden yang menjawab tidak pernah. Disini bisa di lihat bahwa pengorganisasian Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso tidak terlaksana secara efektif.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang staf dengan inisial SS yang menyatakan bahwa :

“Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam melakukan pelaksanaan suatu rencana kegiatan pengorganisaian berupa tugas atau wewenang yang dilimpahkan masih belum efektif disebabkan karena kurang adanya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan dalam pengorganisaian tugas sehingga dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan kemampuan”. (hasil wawancara 7 Mei 2013)

Dari penelitian selama ini yang di dapat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dapat disimpulkan bahwa Pengorganisaian tugas dalam pelaksanaan rencana kegiatan antara atasan dan bawahan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat belum efektif. Dengan kata lain pengorganisasian untuk dapat terlaksanan rencana kegiatan, perlu dilakukan pengorganisasian berupa tugas atau wewenang dan tanggung jawab para pelaksanan untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja, dilakukan pembagian habis seluruh program, kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh staf pegawai Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. pengorganisasian Pemberian tugas dan wewenang kepada bawahan sangat penting dalam rangka efesiensi dan efektifitas kerja organisasi, dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pimpinan kepada pegawai diharapkan tugas pekerjaan dalam penyelesaiannya dapat berjalan secara efektif.

3. Penggerakan

Fungsi manajemen ini merupakan fungsi penggerak semua kegiatan program untuk mencapai tujuan program. Tujuan fungsi *Actuating* atau pelaksanaan adalah menciptakan kerjasama yang lebih efisien dan efektif mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, dan membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Penggerakan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilakukan oleh Kepala Dinas kepada staf atau bawahan dengan berpedoman pada perencanaan dan mengorganisir dengan baik. Salah satu penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas adalah dengan memberikan penghargaan kepada staf yang sukses melakukan tugasnya, penghargaan

tersebut berupa insentif ataupun pujian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 11
Pendapat Responden Tentang Penggerakan
Penghargaan Oleh Pimpinan

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	17	39.5
Kadang – kadang	23	53.4
Jarang sekali	3	7
Tidak pernah	-	-
Jumlah	43	100

Sumber : Olahan Data Primer 2013

Berdasarkan tabel 11 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden 17 atau 39.5 % responden yang menjawab selalu, 23 orang atau 53.4 % responden menjawab kadang – kadang, dan 3 orang atau 7 % menjawab jarang sekali.

Bedasarkan dari hasil wawancara dengan staf inisial S menyatakan bahwa

“ Kepala Dinas selalu memberikan penghargaan kepada pegawai berupa pujian dan pemberian insentif seperti pemberian uang diluar gaji ”.
(hasil wawancara 7 Mei 2013)

Dari pernyataan tersebut bahwa Kepala Dinas selalu memberikan penghargaan kepada staf yang sukses melaksanakan tugasnya secara efektif. Penghargaan tersebut berupa pemberian insentif dan pujian.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan, yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu mengadakan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana. Hal ini bisa dilihat pada table berikut dengan pertanyaan pimpinan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan para staf.

Tabel 12
Tanggapan Responden tentang
Pengawasan Pimpinan

Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	23	53,4
Kadang – kadang	12	28
Jarang sekali	8	18,6
Tidak Pernah	-	-
Jumlah	43	100

Sumber : Olahan data Primer 2013

Berdasarkan tabel 12 tersebut menunjukkan bahwa dari 43 orang responden, 23 atau 53,4 % responden yang menjawab selalu, 12 orang atau 28 % responden menjawab kadang - kadang, dan 8 orang atau 18,6 % menjawab jarang sekali.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staf Dinas Pertanian Dan Perkebunan inisial M bahwa :

“Pengawasan selalu dilakukan oleh pihak Dinas”. Selain Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas adalah secara setiap bulan dan setiap para staf melakukan pekerjaannya. Pengawasan ini adalah pengawasan pelayanan dan pelayanan administrasi”. (hasil wawancara 9 Mei 2013)

Sehubungan dengan efektifitas pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilakukan secara berkala setiap bulan dan setiap pada staf melakukan pekerjaannya hal ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan yang efektif pada sektor pemerintahan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso.

a. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Rendahnya mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan Pelayanan disektor Dinas Pertanian Dan Perkebunan Khususnya petugas/penyuluhan pertanian terutama pada pengembangan sistem dan

usaha agribisnis kepada masyarakat. SDM yang berkualitas adalah persyaratan mutlak keberhasilan pembangunan pertanian. Dalam upaya mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Pertanian Dan Perkebunan khususnya petugas penyuluh pertanian yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi kerja petugas teknis / penyuluh pertanian melalui penyelenggaraan Pelatihan, Dengan ditingkatkannya kompetensi kerja Petugas maka akan meningkatkan pula kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya petani. Pembinaan SDM Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilaksanakan sbb :

1.) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)

Tercapainya tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan sangat ditentukan pada kualitas Aparatur Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam hal ini petugas teknis / Penyuluhan Pertanian lapangan yang berperan sebagai mediator dalam mentransfer ilmu pertanian dan teknologi pertanian dalam pemberdayaan dan pembinaan. Aktifitas petugas teknis / penyuluh pertanian sangat ditentukan dalam peningkatan keahlian (kemampuan dan keterampilan). Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis melalui pelaksanaan sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan pemberian Pelatihan Kewirausahaan kepada pegawai, pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan keterampilan bagi petani dan juga memberikan peluang pengembangan usaha di bidang pertanian untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam mencari peluang usaha agribisnis.

2) Program Pengembangan Agribisnis Holtikultura

Program ini dilaksanakan dengan pemberian Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Holtikultura kepada pegawai penyuluh pertanian, yang dimaksud dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani holtikultura akan pentingnya pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dengan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang berwawasan lingkungan.

b. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso sangat terbatas Sarana dan Prasarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan sarana dan prasarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusianya sendiri. Salah satu yang juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor sarana pelayanan karena dengan adanya sarana dan prasana pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya bisa membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Sarana dan Prasarana pelayanan yang memadai di tandai dengan jumlahnya yang mencukupi dan kondisinya yang memadai. Sedangkan sarana dan prasarana pelayanan yang buruk ditandai dengan jumlahnya yang tidak mencukupi dan kondisinya yang tidak memadai. Sarana dan Prasarana sangat terbatas sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi maupun kegiatan pelayanan. Hal ini dari hasil penelitian ditemukan sebagian sarana dan prasarana seperti meja, kursi, Mesin Ketik dan Komputer yang masih kurang dan belum adanya pengadaan barang baru selain itu ruangan tempeat pelayanan masyarakat masih perlu di perbesar karena sempit. Hal ini apabila berlarut akan berdampak pada kinerja Aparatur Dinas Pertanian Dan Perkebunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian dari hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso mulai dari perencanaan Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebelum melakukan suatu kegiatan atau program diawali dengan perencanaan, sehingga fungsi perencanaan berjalan dengan efektif, penggerakan Salah satu penggerakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas adalah dengan memberikan penghargaan kepada staf yang sukses melakukan tugasnya, penghargaan tersebut berupa insentif ataupun pujian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dilakukan secara berkala setiap bulan dan

setiap pada staf melakukan pekerjaannya hal ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan yang efektif pada sektor pemerintahan Dinas Pertanian dan Perkebunan. pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan untuk pengorganisasian tugas dalam pelaksanaan rencana kegiatan antara atasan dan bawahan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat belum efektif. Dengan kata lain pengorganisasian untuk dapat terlaksanan rencana kegiatan, perlu dilakukan pengorganisasian berupa tugas atau wewenang dan tanggung jawab.

2. Dari hasil penelitian ditemukan pula faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso adalah Kemampuan Sumber Daya Manusia dan kurangnya Sarana dan Prasarana, seperti Meja, Kursi dan Komputer serta terbatasnya biaya operasional.

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah secara khususnya Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso dalam proses perencanaan harus diperhatikan tentang kelambatan penyelesaian urusan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab harus di perhatikan dan diperbaiki untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat
2. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Poso mulai dari penggereakan dan pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik namun Pengorganisasian masih belum diperbaiki.
3. Dalam rangka pemberian pelayanan pada masyarakat harus diperhatikan Kemampuan dan Keahlian Sumber Daya Manusia dalam hal ini Aparat teknis atau Penyuluh pertanian dalam pemberian Pelayanan kepada masyarakat. Ditambah sarana dan prasarana harus seperti meja, kursi dan komputer diadakan baru dan biaya operasional harus ditambah guna meningkatkan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gaspersz, Vincent. 2005. *Total Quality Management*. PT. Jakarta: Gramedia
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto,S.2000,*Manajemen Penelitian*.Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dean, S. 1985, *Kepemimpinan Dalam Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Sinar Baru
- Dharma, A.1985. *Manajemen Prestasi Kerja*.Jakarta: Rajawali.
- Djaenuri.2006, *Manajemen Pelayanan Umum*, Jakarta. Institut Ilmu Pemerintahan.
- Gibson,1996.*Perilaku Organisasi* Jakarta: Erlangga.
- Gie, T. L. 1991. *Cara Kerja Efisiensi*. Yogyakarta: Karya Rencana.
- Hadi, S. 1983, *Research Methodology*. Yogyakarta: Sinar Baru.
- Nugroho,A.1996 *Tata Tertib Manajemen*. Surabaya: Penerbit Indah
- Sianipar,J.P.G.2005. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. *Metode Penelitian administrasi*. Alfabeta Bandung. 2004
- Sinambela Lijian Poltak, dkk 2007. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara Jakarta 2007
- Thoha, M. 1992. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali

Dokumen

- Inpres Nomor 1 Tahun 1995. Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- Berlakunya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; yang kemudian kedua UU tersebut direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya UU tersebut akan semakin banyak aktivitas yang harus ditangani oleh Daerah, sehingga aparat di Daerah dituntut untuk dapat memahami dan mempraktekkan ilmu Manajemen Pelayanan